Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam
Volume 7 Nomor 1 Tahun 2025
e-ISSN: 2655-883

ANALISIS PERCERAIAN PADA PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)

Nurul Azizah[1], Faridatus Sa'adah[2], Humaidi[3]
[1,2,3] Universitas Islam Malang
e-mail: [1]22101012028@unisma.ac.id , [2]faridatus.saadah@unisma.ac.id,
[3]humaidikaha@unisma.ac.id

Abstract

Marriage is one of the forms of worship in Islam, where its implementation is considered a fulfillment of Islamic law, especially when intended to avoid actions prohibited by religion. However, marriage is not an obligation for everyone, as it must align with each individual's readiness and circumstances. In Indonesia, marriage is often misunderstood as a necessity, even when individuals are not mentally, emotionally, or economically prepared. This misunderstanding contributes to the rise of early marriages, which have become a cultural phenomenon with serious social implications. The research approach chosen by the researcher is a qualitative approach, using an empirical legal research type or field research, which falls under case study research. The study focuses on the analysis of divorce in early marriages, using the Religious Court of Kediri Regency as a case study. The results of the research following points: 1) the main factors driving divorce among underage couples at the Religious Court of Kediri Regency are poor communication, where couples are often indifferent and uncaring toward each other, mmature thinking, and economic problems, particularly when financial support is uncertain or insufficient; 2) early marriage contributes significantly to household failure and divorce in the Religious Court of Kediri Regency.

Keywords: *early marriage, divorce, Religious Court of Kediri Regency.*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ikatan yang mengikatkan hubungan hati dan perasaan antara dua individu. Ini tidak hanya menciptakan ikatan keluarga, tetapi juga memperluas jaringan sosial dan nasab, serta membawa kelahiran generasi baru. Lebih dari itu, pernikahan membawa manfaat sosial yang luas bagi masyarakat, memperkuat hubungan antar individu dan golongan (Taefuri & Khusurur, 2023). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَه نَسَبًا وَّصِهْرًاۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا

Artinya: "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia menjadkan manusia itu (mempunyai) keturunan dan musaharah dan Tuhanmy adalah Maha Kuasa". (Q.S. Al-Furqan 25: 54)

This work is licensed under Creative Commons Attribution Non Commercial 4.0 International License Available online on: http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index

Pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan jalan untuk menyempurnakan agama. Dalam Islam, pernikahan sangat dianjurkan dan dianggap sebagai sunnah yang mulia. Pernikahan dalam Islam bukan sekedar ikatan antara dua individu, tetapi merupakan jalan ibadah dan upaya untuk memenuhi sebagian tujuan hidup, yaitu menjaga kehormatan, menundukkan pandangan, dan melestariakn generasi yang beriman. (Putri & Yuliandari Gunatirin, 2020). Islam mengajarkan pernikahan untuk berbagai tujuan yang baik dan mulia, secara keseluruhan, Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah cara untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kesucian manusia, memberikan keamanan dan dukungan emosional, sekaligus memenuhi tujuan spiritual yang lebih tinggi. Pernikahan adalah suatu ikatan sakral dan sangat dihargai.

Pernikahan secara konsep merupakan sebuah solusi yang ditawarkan dalam syariat Islam sebagai langkah pencegahan untuk menghindarkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Akan tetapi kenyataannya pernikahan tanpa sebuah persiapan akan melahirkan permasalahan baru. Kesalahan persepsi dan cara memahami makna pernikahan secara ideal menjadikan babak baru, seperti pernikahan yang terlalu dipaksakan bahkan ketika pasangan belum memiliki kesiapan secara matang, fenomena ini disebut dengan pernikahan dini. Pernikahan dini telah menjadi sebuah budaya nasional yang mempunyai pengaruh besar terhadap pola kehidupan masyarakat di Indonesia. Indonesia menempati peringkat ke-37 dalam jumlah pernikahan di bawah umur dan peringkat ke-2 di Asia Tenggara. Tentu saja hal ini bukan sesuatu yang bisa dibanggakan karena berdampak pada kepadatan penduduk Indonesia, karena pernikahan berpotensi menyebabkan tingginya angka kelahiran. (Mauliddiyah, 2021).

Di Jawa Timur telah melakukan penelitian diketahui bahawa Indonesia tahun 2017 kasus pernikahan anak, kasus kekerasan berbasis gender dan seksual, serta tingkat pengetahuan mengenai hak kesehatan seksual dan reproduksi merupakan 3 fakta yang saling berkaitan satu sama lain. Kenyataan ini tidak mengherankan, melihat data Pengadilan Agama yang diperoleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur. Kasus permasalahan perknikahan di bawah umur yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah kasus pernikahan dini, hal ini banyak terjadi karena pergaulan bebas yang menjadi penyebab utama masyarakat. Sehingga jika hal ini terjadi maka akan banyak dampak negatifnya, yaitu menimbulkan permasalahan dalam keluarga, seperti meningkatnya angka perceraian, kesenjangan sosial, dan ketidak harmonisan dalam ikatan keluarga. (Putri & Yuliandari Gunatirin, 2020).

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni, rumusan masalah yang pertama bertujuan Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perceraian pada pernikahan usia dini. Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut harus didukung dengan kematangan fisik, materi dan mental setiap calon pengantin. Berbagai faktor melatar belakangi terjadinya perkawinan di bawah umur dan menjadi permasalahan besar apabila tidak terjadi perceraian, diperlukan analisa permasalahan yang tepat berdasarkan data yang akurat dan terpercaya serta solusi penyelesaian permasalahan tersebut. (Roihanah & Cornelia, 2019).

B. Metode

Pendekatan penelitian yang dipilih oleh peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena, sikap, maupun aktivitas sosial baik invidu maupun kelompok dengan karakteristik bahwa data dalam penelitian dinyatan dengan kondisi nyata yang dideskripsikan dengan berupa kata atau kalimat dengan merubah data menjadi angka maupun simbol. (Yaqin Akmalul, 2022). Jenis penelitian ini dapat disebut penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang cara pengaplikasiannya dengan meriset keadaan lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data aktual. (Hamid, 2023) Penelitian ini termasuk dalam penelitian studi kasus (case studies) yang mengkaji analisis perceraian pada pernikahan usia dini studi kasus Pengadilan Agama Kabupten Kediri.

Sumber data penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 1) data primer yang merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan temuan di lapangan melalui cara observasi, wawancara, dan diskusi; 2) data sekunder yaitu data yang dikumpulkan dari referensi literatur yang tersedia serta publikasi yang relevan; 3) sumber data tersier yaitu data yang memberikan penjelasan tambahan, seperti kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, dan wawancara semi-terstruktur. Analisis data dilakukan dengan pendekatan model mengalir, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, yakni membandingkan data dari berbagai sumber dan alat untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Perceraian pada Pernikahan Dini Menurut Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, aturan ini telah direvisi dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 yang menyamakan usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Yohana Yembise, menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk melindungi anak-anak dari praktik pernikahan anak yang sangat merugikan, baik bagi anak, keluarga, maupun negara. Revisi ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menciptakan pernikahan yang sehat dan sejahtera.

Namun, pada kenyataannya masih banyak yang melangsungkan pernikahan dini dengan cara mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Pun hal ini tidak sedikit dari pasangan yang menikah di bawah umur pada akhirnya memutuskan untuk bercerai. Perceraian adalah hal yang tidak diinginkan oleh siapapun, namun menjadi pilihan terakhir ketika masalah dalam pernikahan tidak lagi dapat diselesaikan. Perceraian terjadi dimana ketika salah satu atau kedua pasangan memutuskan berpisah yang mengakibatkan terputusnya hubungan keluarga. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dalam pernikahan usia dini antara lain:

a. Faktor ekonomi

Kehidupan adalah sebuah perjuangan yang memerlukan pengorbanan, baik fisik maupun material. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kehidupan keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat masalah ekonomi. Pers elisihan ini sering kali berawal dari ketidakpuasan istri terhadap penghasilan suami yang terbatas atau karena suami tidak memberikan nafkah atau belanja kepada istrinya. Akibatnya, timbullah perselisihan dan pertengkaran setiap hari yang berujung di pengadilan (Hilma 2022).

Masalah ekonomi nyaris selalu menjadi bagian dari adanya konflik rumah tangga mereka sehingga hal ini bisa mempengaruhi kualitas hidup bersama dan memicu perselisihan yang mempengaruhi kestabilan pernikahan. Masalah ekonomi bisa menjadikan akhir pernikahan karena terdapat perselisihan setiap hari. Perkara yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

yaitu yang terjadi pada pasangan KN dan MH yang belum lama pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Pasangan ini mengajukan permohonan karena sering bertengkar masalah ekonomi termasuk uang belanja kurang dan lain sebagainya.

b. Perbedaan prinsip dan kedewasaaan berpikir

Perbedaan prinsip atau kemauan juga bisa mengakibatkan pada perceraian. Hal ini biasanya disebabkan karena pasangan yang masih enggan untuk menurunkan egonya sehingga dapat meicu konflik pertengkaran dan berakibat pada perceraian (Abrori, 2024). Faktor terjadinya perceraian pada pernikahan dini di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri misalnya Putusan Nomor 1037/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr dari pasangan RA dan MAS disebabkan karena komunikasi yang kurang baik juga pemikiran yang kurang dewasa sehingga masih mempunyai rasa ingin menang sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya siap untuk kompromi dan bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan bersama. Sikap egois seperti ini bisa menjadi pemicu utama konflik yang berkelanjutan dalam pernikahan. dampak masalah ekonomi dalam dinamika pernikahan dini. Ketika pasangan menghadapi tekanan finansial atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, hal ini dapat menambah beban stres dan ketegangan dalam hubungan mereka.

c. Kehadiran orang ketiga

Kehadiran orang ketiga dalam pernikahan seringkali menjadi faktor pemicu perceraian, terutama bagi pasangan yang menikah di usia dini. Pasangan muda sering kali belum matang secara emosional dan mungkin kurang pengalaman dalam mengelola konflik dan menjaga kepercayaan dalam hubungan. Ketidak stabilan ini dapat membuat mereka lebih rentan terhadap godaan dari pihak ketiga. Ketika salah satu pasangan muda menjalin hubungan dengan orang ketiga, rasa kepercayaan yang masih berkembang bisa dengan mudah hancur. Perasaan dikhianati dan terluka ini sering kali sulit untuk diperbaiki karena pasangan muda mungkin belum memiliki keterampilan komunikasi dan penyelesaian masalah yang kuat. Sebagai hasilnya, konflik yang timbul dari kehadiran orang ketiga bisa dengan cepat membesar, mengarah pada perpecahan dan akhirnya perceraian. Ini menggambarkan betapa rentannya pernikahan usia dini terhadap masalah-masalah eksternal seperti godaan dari orang ketiga,

mengingat ketidakmatangan emosional dan kurangnya pengalaman dalam mengatasi krisis hubungan (Octaviani, 2020).

d. Kurangnya kesiapan mental untuk menghadapi kehidupan setelah menikah

Perceraian di kalangan pasangan usia dini sering kali disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental. Pasangan yang menikah pada usia muda mungkin belum sepenuhnya matang secara emosional atau psikologis untuk menghadapi tantangan dan tanggung jawab yang datang dengan kehidupan pernikahan. Ketidaksiapan mental ini membuat pasangan muda lebih rentan terhadap masalah pernikahan yang bisa berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penting bagi pasangan muda untuk mempertimbangkan serta mempersiapkan matang-matang sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan (Khoiriyah et al., 2024).

Hal tersebut didasarkan pada data yang bersumber dari Putusan Nomor 6650/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr bahwa yang menjadi salah satu faktor utama yaitu kurangnya kesiapan mental dimana kondisi psikologis dan mental yang belum stabil pada pasangan muda juga dapat memicu perceraian. Emosi yang labil dan sifat egois yang masih tinggi membuat mereka belum mampu menyikapi permasalahan rumah tangga dengan bijaksana dan dewasa. Perubahan status yang terjadi dengan cepat dapat berdampak negatif pada pasangan yang menikah di usia dini, karena mereka belum siap dengan tanggung jawab, peran, dan kewajiban baru yang harus dijalani setelah menikah. Seperti pada kasus rumah tangga FND dan MIS Putusan Nomor 6650/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr yaitu masalah kurangnya kesiapan mental dimana kondisi psikologis dan mental yang belum stabil. Masalah rumah tangga yang terjadi yaitu ego sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab utama dari adanya suatu perceraian bagi pasangan dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah komunikasi yang kurang baik juga pemikiran yang kurang dewasa serta masalah ekonomi kemudian karena perbedaan gaya hidup, faktor lain juga disebabkan banyak diantara mereka karena pikiran yang masih labil belum dewasa, pihak ketiga dan tidak bertanggung jawab.

Mengetahui penyebab di atas tentu saja perlu ditekankan pada orang tua betapa pentingnya peran orang tua dalam melindungi anak-anak mereka dari pernikahan dini. Sebagaimana Pasal 26 Ayat (1) Angka (3)

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, orang tua memiliki kewajiban dari tanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak karena akan berdampak pada pasangan usia dini tersebut (Dahris Siregar et. at, 2024).

2. Alasan Hakim Mengabulkan Perceraian Pada Pernikahan Dini

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengabulkan permintaan perceraian ialah:

a. Ketidaksiapan Psikologis Dan Emosional

Berdasarkan Informasi melalui wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dampak daripada kegagalan pernikahan akibat pernikahan dini ialah pengolahan emosional, psikologis, kesehatan, moralitas, adat istiadat, budaya, agama, dan potensi dampak negatif. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pernikahan yang dilaksanakan dapat menghasilkan keluarga yang bahagia, tenang, dan damai baik di dunia maupun di akhirat. Banyak sekali faktor sehingga terjadinya permohonan dispensasi nikah misalnya seperti pendidikan, ekonomi, tradisi atau budaya, kemauan sendiri hingga paksaan orang tua.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menghendaki pria dan wanita bersatu dalam pernikahan agar dari persatuan mereka tercipta generasi baru yang akan melanjutkan eksistensi manusia di bumi. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan umat-Nya untuk menikah, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nur Ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia- Nya. Allah Mahaluas (pemberian- Nya) lagi Maha Mengetahui".

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bagi siapa saja yang belum memiliki pasangan hidup, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki hasrat untuk menikah namun berada dalam keadaan fakir, dianjurkan untuk tetap menikah karena Allah adalah Maha Pemberi Rezeki dan Maha Mengetahui keadaan umat-Nya. Hingga saat ini, pernikahan tetap menjadi salah satu kebutuhan manusia. Yang paling utama dalam pernikahan adalah kualitas hubungan antara suami dan istri, serta kehidupan sosial

setelah menikah. Kesejahteraan keluarga menjamin kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat pada dasarnya terdiri dari unit-unit kecil keluarga yang hidup bersama (Mouliza et al., 2023).

Pernikahan dianggap layaknya kebutuhan makan, minum, dan pakaian bagi mereka. Pria tertentu membutuhkan wanita tertentu, dan sebaliknya; tidak ada yang dapat menghalangi mereka untuk bersatu sebagai pasangan yang sah. Mayoritas kaum muda aktif secara seksual sejak usia sepuluh tahun bagi wanita, dan sejak baligh bagi laki-laki, dengan segala konsekuensi berbahaya seperti aborsi, banyaknya anak-anak tanpa status resmi di jalanan dan perkampungan miskin; munculnya berbagai macam penyakit, tindakan perzinahan, perselingkuhan, dan bunuh diri; serta timbulnya homoseksualitas, perdagangan anak, dan lain-lain (Agustian, 2021).

Terkait anak perempuan berusia 9 tahun, terdapat dua pendapat. Pertama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa anak perempuan berusia 9 tahun diperlakukan sama seperti anak berusia 8 tahun, sehingga dianggap belum baligh. Kedua, anak perempuan berusia 9 tahun dianggap telah baligh karena kemungkinan telah mengalami haid, sehingga diperbolehkan untuk menikah meskipun ia tidak memiliki hak khiyar seperti yang dimiliki oleh wanita dewasa (Saputera & Abdillah, 2021). Menurut pemikiran ulama klasik (salaf) seperti Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, mereka tidak mensyaratkan mumayyis atau kedewasaan bagi calon mempelai. Bagi mereka, akil baligh sudah cukup. Kebijakan ini didasarkan pada kenyataan bahwa tidak ada ayat Al-Qur'an yang secara jelas mengatur batas usia pernikahan (Yopani, 2021).

Menurut Imam Muhammad Syirazi dan Asadullah Dastani Benisi, budaya pernikahan dini dibenarkan oleh ilmuwan dan agama. Ini merupakan norma di kalangan umat Muslim sejak awal Islam, sebelum adanya serangan budaya, ekonomi, dan militer dari Barat dan Timur atas tanah-tanah Muslim. Jika pernikahan dini tidak diperhatikan, akan terjadi kerusakan moral, yang paling ringan berupa masturbasi, serta munculnya berbagai penyakit, sebagaimana diakui oleh kalangan medis. Adalah budaya kaum Muslim untuk menikahkan gadis antara usia 10 hingga sekitar 15 tahun, dan laki-laki antara awal baligh hingga usia 18 tahun. Pernikahan dini dianggap sebagai kebutuhan vital bagi mereka, terutama

karena kemudahannya. Tidak diperlukan studi yang rumit atau peralatan militer untuk mewujudkannya (Winda, 2023).

b. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi sangat memprihatinkan dari pihak keluarga. Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk meringankan beban keluarga, maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur. Dalam teori lain banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang menyebabkan maraknya perkawinan di bawah umur. Ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah demi membantu orang tuanya. Terkait dari informasi selanjutnya bahwasannya hakim mengabulkan permintaan perceraian karena hakim tidak mau mengambil resiko dari pasangan atau korban yg telah mengajukan perceraian. Ada kalanya hakim mengabulkan karena alasan yang tidak bisa dibantah lagi dan salah satu cara yaitu mengabulkan perceraian.

c. Masalah Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan, dimana pendidikan dapat menyongsong kehidupan yang cerah dimasa depan, baik bagi diri sendiri, sosial, lingkungan, agama, nusa dan bangsa. Keluarga adalah tempat pertama anggota baru belajar banyak hal, dukungan keluarga akan menjadikan anak yang tumbuh dengan penuh kasih sayang, percaya akan diri sendiri serta penuh dengan aksi pintar. Upaya orang tua tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah dan ibu serta anak. Upaya yang dilakukan oleh orang tua yang menikah dini adalah selalu tepat waktu dalam mengerjakan tugas, selalu berbicara lembut kepada orang tua dan orang lain, selalu beribadah tepat waktu, memberikan motivasi, dan selalu memberikan contoh dengan terus menerus. Orang tua adalah pendidikan utama dan pertama dalam hal penanaman keimanan dan pengetahuan bagi anak, disebut pendidikan utama karena besar sekali pengaruhnya (Dewi et al., 2022).

Pada masa kini ada beberapa alasan mengapa perceraian itu bisa terjadi dan hakim mengabulkan perceraian tersebut tidak hanya berasal dari diri pribadi pasangan melainkan juga dari perbedaan prinsip yang harus diterima ketika sudah berumah tangga. Berbagai macam kondisi yang menyebabkan perceraian terjadi dan sering dilakukan oleh masyarakat, salah satunya yang melakukan pernikahan dini. Masih banyak terjadi pernikahan dini pada anak dan remaja di Indonesia. Sebanyak 38% anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7%. 4 Pilihan menikah di usia yang masih sangat dini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi dan dijalankan, banyak resiko yang harus ditanggung oleh remaja itu sendiri. Keluarga yang terbentuk tanpa kematangan usia dan kesiapan dari segala arah biasanya dari segi fisik tidak terpenuhi dengan baik karena belum mendapatkan pekerjaan yang baik dan ekonomi keluarganya tidak tercukupi (Munawara et al., 2021).

Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang. Sayangnya, terkadang para anak perempuan ini juga menikah dengan pria berstatus ekonomi tidak jauh beda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru. Banyak ditemui kasus orang tua yang terlilit hutang dan tidak mampu membayarnya (Badruzaman, 2021). Dalam teori yang pernah dikaji oleh peneliti jika orang tua yang terlilit hutang tersebut memiliki anak gadis, maka anak gadis tersebut akan diserahkan sebagai "alat pembayaran" kepada orang yang memberikan piutang. Sehingga setelah anak tersebut dikawini, maka lunaslah hutang-hutang yang melilit orang tuanya. Bagi kalangan masyarakat miskin, menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban. Orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena anaknya sekarang sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Mereka merasa bahwa semakin cepat anak gadisnya kawin, semakin baik bagi kehidupan mereka. Bukan karena kebahagiaan si anak, tetapi karena pertimbangan berat ringannya beban hidup yang akan mereka tanggung (Layyinah et al., 2024).

Penulis juga memberikan penjelasan terkait beberapa hal yang disebutkan dalam faktor terjadinnya perceraian pernikahan dini pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Selain faktor ketidak harmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering diakibatkan krisis moral dan akhlak, yang mana hal itu membuat suami atau istri melalaikan tanggung

jawabnya baik suami ataupun istri. Seperti poligami yang tidak sehat, peng- aniayaan, pelecehan dan keburukan lainnya yang dilakukan istri atau suami, misalnya mabuk, berzina, terlibat tindak kriminal, bahkan hingga utang piutang. Tidak jarang penganiayaan atau kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga termasuk masalah serius yang dihadapi pasangan suami istri. Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU Perlindungan Perempuan dan Anak, yang salah satu isi pasalnya mencantumkan masalah tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan yang dapat dikenai tuntutan pengadilan pidana. Untuk itu, maka sudah saatnya kekerasan dalam rumah tangga tidak lagi dianggap sebagai persoalan domestik yang seringkali disimpan sebagai aib yang tidak boleh diungkapkan kepada publik atau masyarakat.

D. Simpulan

Faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya perceraian pasangan dibawah umur di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri penyebab dari adalah adanya faktor komunikasi yang kurang baik yang sering kali psangan tersebut acuh tak acuh dan saling tidak peduli juga pemikiran yang kurang dewasa serta masalah ekonomi dimana ketika nafkah kurang tentu. Salah satu yang menjadi pemicu pertengkaran dan akhirnya memutuskan berpisah kemudian karena perbedaan gaya hidup, faktor lain juga disebabkan banyak diantara mereka karena pikiran yang masih labil belum dewasa sehingga ketika terjadi suatu masalah mereka tidak mampu menyelesaikan secara dewasa, faktor KDRT, faktor pihak ketiga dan faktor tidak bertanggung jawab.

Hakim memiliki beberapa alasan untuk mengabulkan suatu perceraian dalam pernikahan, terkhusus pada pernikahan dini sebagaimana peneliti melakukan wawancara dan observasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai berikut: 1) Ketidaksiapan psikologis dan emosional; 2)Ketidaksiapan ekonomi; 3) Masalah pendidikan

Daftar Rujukan

Abrori, M. (2024). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Tingkat Perceraian*. SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga …, 4(1), 1–11.

Badruzaman, D. (2021). *Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung*. Muslim Heritage, 6(1). https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2653

Dahris Siregar et. at. (2024). *Perlindungan Hukum dan Pencegahan Perdagangan*

Perempuan dan Anak. Pengabdian Masyarakat, *6*(1), 29–38. https://doi.org/10.30656/ps2pm.v6i1.7818

Dewi, S., Aviva, N., Asfiyak, K., & Muslim[3], M. (2022). *Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Periode Tahun 2020-2021 Studi Kasus Di Desa Kwadungan Kabupaten Kediri.* Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, 4, 120–129.

Evander, R., Napitupulu, E., & Saragih, P. (2023). *Perkawinan Usia Dini di Desa Singasari Jonggol Tahun 2012.* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 1(1), 8–13.

Hamid, A. (2023). *Dinamika Dalam Prosedur Perceraian: Sebuah Tinjauan Maslahat Pada Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Desember, 04(2), 1–14.

HILMA, H. A. (2022). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Akibat Pernikahan Dini Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Jawa Barat)*. *2019*.

Jennyola Savira Wowor. (2021). *Perceraian Akibat Pernikahan dibawah Umur (Usia Dini).* Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 814–820. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.278

Jenuri, A. N. (2021). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia.* De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah, 3(2), 127–142. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144

Khoiriyah, M., Basyiroh, A., Jl, A., Jaya, I., Cukir, T., Diwek, K., & Jombang, K. (2024). *Analisis Perceraian Akibat Pernikahan Dini. XI(4), 281–291.*

Layyinah, K., Sunariyah, A., Hipni, M., Mawardi, I., & Madura, U. T. (2024). *Problematika pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga dalam pespektif* ekonomi syariah. 5, 269–284.

Mouliza, N., Ramini, N., & Duha, S. (2023). *Faktor Keluarga.* Jurnal Bidan Mandiri, 1(1), 24–34.

Munawara, N., Hasan, M., & Ardiansyah, A. (2021). *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas I-B Sambas.* Al-Usroh, 1(2), 107–131. https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393

Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). *Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia.* In Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS (Vol. 2, Issue 2, pp. 33–52).

Putri, D. A., & Yuliandari Gunatirin, E. (2020). *Mindful-Based Cognitive Therapy (MBCT) dan Self-Awareness untuk Menurunkan Kecemasan Ibu Hamil Primipara.*

Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi, 5(1), 1–24. https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.878

Roihanah, R., & Cornelia, I. (2019). *Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.* Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies, 1(1). https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1820

Saputera, A. R. A., & Abdillah, N. (2021). *Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo.* Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, 2(2), 314–331. https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.18200

Winda Fitri. (2023). *Judex Facti Peradilan agama dalam menangani Perkara Cerai* Talak : analisis putusan nomor 2029/ PdT.g/2022/Pa.bTm JUDEX. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, *4*(1), 271–293.

Yaqin Akmalul, H. (2022). *Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Batu Lappa, Desa Tapporang*. 1–119.

Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.* Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3(1), 27–36. https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24